

**SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DALAM MEWUJUDKAN
KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN
WILAYAH PERKOTAAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Petty Sari Sitompul
NPP. 31.0711

Asdaf Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: pettysarisitompul@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Dr.Dadang Supriatna, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Every region has a vision to create an orderly, clean, and beautiful urban environment. The same is being done in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province. The increasing number of K-3 violators indicates the challenges faced by the Environmental Service and the Public Order Enforcement Unit (Satpol PP) in controlling the community's behavior related to environmental pollution in urban areas due to the lack of public awareness of the applicable regulations. **Purpose:** The purpose of this study is to describe and analyze the synergy between Satpol PP and the Environmental Service in East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province, as well as the supporting and inhibiting factors. **Method:** This research uses Doctoroff's (1977) theory which examines Synergy into four Dimensions, namely Effective Communication, Feedback, Trust, and Creativity. The approach used in this research is descriptive qualitative. **Results/Findings:** Findings that the community's pro-active participation in waste management in East Kotawaringin Regency has gone well due to good collaboration between the local government and the community. Synergy between Satpol PP and DLH is the key to running the K-3 program in urban areas. **Conclusion:** The results of the study show that the synergy between Satpol PP and the Environmental Service in achieving order, cleanliness, and beauty in the urban areas of East Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Province has not reached the maximum level. Satpol PP and the Environmental Service have made every effort to realize order, cleanliness, and beauty. However, there are still some violators who are difficult to reach and resolve. Both agencies have tried their best with the existing limitations and have communicated and coordinated to achieve the goal of making the community understand environmental insight. **Keywords:** Synergy, Order, Cleanliness, Beauty

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Setiap wilayah memiliki visi untuk menciptakan

lingkungan kotayang tertib, bersih dan indah. Hal yang sama dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Terjadinya peningkatan jumlah pelanggar K-3 menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh DinLH dan Satpol PP dalam mengendalikan perilaku masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah perkotaan karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Sinergitas dari Satpol PP dan DLH dalam mewujudkan K3 di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian ini menggunakan teori Doctoroff (1977) yang mengkaji Sinergitas menjadi empat Dimensi yaitu Komunikasi yang efektif, Umpan balik, Kepercayaan, Kreatifitas. Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. **Hasil/Temuan:** Temuan bahwa partisipasi pro aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas masyarakatnya. Sinergi Satpol PP dan DLH sebagai kunci berjalannya program K-3 di wilayah perkotaan. **Kesimpulan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara Satpol PP dan DinLH dalam mencapai ketertiban, kebersihan dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah belum mencapai tingkat yang maksimal. Satpol PP dan DinLH sudah berupaya keras dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. Namun, masih terdapat oknum pelanggar yang sulit dijangkau dan teratasi. Kedua instansi telah berusaha sebaik mungkin dengan keterbatasan yang ada dan melakukan komunikasi serta koordinasi untuk mencapai tujuan masyarakat paham wawasan lingkungan. **Kata Kunci: Sinergitas, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu lingkungan merupakan hal krusial yang menarik perhatian pemerintah baik secara global maupun lokal. Saat ini, sampah plastik diluar kendali dunia. Indonesia memiliki ribuan pulau dan wilayah laut lebih luas daripada daratan. Kondisi ini berdampak kepada peningkatan jumlah limbah sampah plastik yang berakhir terbuang ke lautan lepas. Menurut laporan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2022, setiap tahun sekitar 1,2 juta ton sampah plastik sekali pakai ditemukan di perairan laut Indonesia dan menyebabkan banyak hewan laut mati. World Health Organization 2019 memprediksi pada tahun 2050 terdapat potensi 12 triliun ton limbah sampah plastik akan mengotori darat dan laut. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2021 memetakan data sampah yang dikumpulkan dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sekitar 9% berhasil di daur ulang, 12% dibakar, dan 79% sisa sampah plastik masih berada di bumi. Faktor penyebabnya adalah jumlah penduduk Indonesia yang bertambah banyak yakni mencapai angka 275,77 juta jiwa pada tahun 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). “Law And Order” adalah istilah yang merujuk pada situasi di mana hukum dipatuhi dan orang-orang bersikap teratur dan damai. Istilah ini juga dapat merujuk pada penerapan hukum yang ketat. Terkait pengelolaan sampah di Indonesia, larangan membuang sampah sembarangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 29 Ayat 1 huruf e menegaskan, setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan ini termasuk juga ke saluran air, sungai atau tempat lainnya yang bukan

ditujukan untuk pembuangan sampah. Kemudian, sampah yang telah dikumpulkan harus dibuang ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). Sampah-sampah tersebut kemudian akan diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Kabupaten Kotawaringin Timur menduduki jumlah penduduk terpadat di Provinsi Kalimantan Tengah yakni mencapai angka 436.079 ribu jiwa tahun 2022 (BPS Provinsi Kalimantan Tengah). Peningkatan jumlah penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan peningkatan dalam volume, jenis, dan sifat sampah yang menjadi semakin beragam.

1.2 Kesenjangan Masalah

Salah satu bidang pelayanan pemerintahan yang berkaitan dengan pemeliharaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah tupoksi dari Dinas Lingkungan Hidup (DinLH). Sementara itu, menjaga ketertiban masyarakat menjadi tupoksi dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, dalam kondisi ini, sulit bagi aparat pemerintah untuk mengawasi perilaku masyarakat dalam hal pembuangan sampah selama 24 jam. Sinergi antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur sangat diperlukan agar tugas dan fungsi mereka dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien, terutama dalam memberikan tindakan pencegahan (preventif), sosialisasi, teguran, pemahaman, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat. Meskipun telah dipasang tanda peringatan yang melarang pembuangan sampah di tempat-tempat tersebut, masih banyak pelanggaran yang tercatat. Berdasarkan data indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Timur, Jumlah pelaku pelanggaran ketertiban, kebersihan, dan keindahan pada tahun 2022 mencapai 396 pelanggaran, dan meningkat menjadi 435 pelanggaran pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa DinLH dan Satpol PP masih menghadapi tantangan dalam mengendalikan perilaku masyarakat terkait pencemaran lingkungan di wilayah kota. Situasi ini mencerminkan bahwa masih ada warga masyarakat yang kurang peduli terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan peringatan, himbauan, dan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengetahui bagaimana pelaksanaan sinergitas oleh Satpol PP dan DinLH Kabupaten Kotawaringin Timur. Permasalahan ini memerlukan penelitian yang mendesak karena banyak sampah plastik yang tidak dapat terurai dan tata kelola sampah yang tidak memiliki sanitasi menyebabkan penimbunan limbah yang menggunung dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan pencemaran lingkungan. Tanggung jawab dan kesadaran bersama sangat diperlukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa khususnya di wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur.

1.3 Penelitian Terdahulu

Tinjauan literatur ini dilakukan untuk membandingkan kesamaan dan perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat penelitian yang menyebutkan perlunya mempersiapkan lahan yang sesuai, meningkatkan kesadaran dan kerja sama pedagang kaki lima, serta memperluas penelitian untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lingkungan

perkotaan (Desi Purnamasari, 2017). Studi sebelumnya telah menyoroti permasalahan seperti pengabaian terhadap pedagang kaki lima, kurangnya pemenuhan tugas pemerintah, serta ketidakefektifan dalam menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K-3) (Linda Trisyani, 2019). Tinjauan ini juga membandingkan kendala dalam penanganan K-3, termasuk kurangnya peningkatan sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah (Rustam, Yaqub, Hayat 2023), peran penting Satuan Polisi Pamong Praja dalam memberikan ketegasan kepada masyarakat (Vanessa Gloria Gaghauna, 2023), dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten (Bambang Munas Dwiyanto, 2011). Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah dan aktivitas daring untuk meningkatkan kesadaran masyarakat merupakan strategi yang diusulkan (Ade Maulidya, 2020). Komitmen yang kuat dan terobosan kreatif, inovatif dari semua pihak diperlukan untuk mengoptimalkan regulasi lingkungan terkait pengelolaan sampah (Roring, H. N., Tulus, F. M. G., & Kolondam, H. F. 2023). Komunikasi yang efektif antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat melalui fasilitator pengelolaan sampah juga sangat penting (Grace Noor Roselina, 2023). Kendala utama yang teridentifikasi adalah pendanaan dan sumber daya manusia, yang menjadi hambatan besar dalam implementasi program K-3 (Dwi Aries Himawanto, 2005). Meskipun demikian, pengolahan sampah organik menggunakan teknologi biodigester dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat (F Desromi, L Lindawati, RL Chimayati, 2022).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Tinjauan penelitian sebelumnya dimaksudkan untuk membuktikan keaslian dari karya yang diteliti (kebaharuan). Kebaharuan penelitian atau *novelty* penelitian ini terletak pada fokus kajian pada Sinergitas Satpol PP dan DLH dengan objek program ketertiban, kebersihan dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum pernah dianalisis oleh peneliti lain sebelumnya.

1.5 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Sinergitas dari Satpol PP dan DLH dalam mewujudkan K-3 wilayah perkotaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggambarkan permasalahan, mengenali permasalahan yang terjadi, menghimpun kata kunci (*root definition*) untuk mendefinisikan alur proses untuk mendapatkan makna data. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dengan menggabungkan sumber data observasi pada Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur, wawancara pada 13 Informan, dan dokumentasi terkait sinergitas kedua instansi dalam pengelolaan sampah dan himbauan kepada masyarakat. Analisis data bersifat induktif yang merujuk pada Model Miles and Huberman dengan mengumpulkan berbagai data yang lebih menekankan makna daripada generalisasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menganalisis sinergitas Satpol PP dan DinLH dalam mencapai ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan oleh Doctoroff (1977). Hal ini bertujuan untuk memperjelas topik permasalahan dan mengukur efektivitas sinergitas yang telah dilakukan. Berikut adalah dimensi dan indikatornya :

3.1 Analisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur

1. Komunikasi Yang Efektif

Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup (DinLH) memiliki pendekatan berbeda dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Satpol PP berfokus pada menjaga ketertiban masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Satpol PP memusatkan perhatian pada tempat-tempat umum yang ramai, seperti Taman Kota, wilayah PKL, Pasar, dan tempat wisata di Kabupaten Kotawaringin Timur. Himbauan mereka ditujukan tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi juga kepada para pedagang kaki lima yang beroperasi di lokasi-lokasi tersebut. Hal ini dikarenakan potensi pedagang kaki lima dalam menghasilkan sampah yang termasuk dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Satpol PP melakukan patroli rutin untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang daerah-daerah yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk berjualan. Jika terdapat masyarakat yang melanggar aturan, Satpol PP memberikan arahan yang tegas bahwa daerah tersebut memang tidak diizinkan untuk berjualan. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa Satpol PP selalu memberikan himbauan saat melakukan patroli, yang dilakukan tiga kali dalam sehari.

2. Umpan Balik

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas DinLH pada tanggal 11 Januari 2024, dapat diketahui bahwa telah terjadi perubahan tindakan masyarakat terkait pengelolaan sampah, meskipun persentasinya masih terbilang kecil. Oleh karena itu, DinLH bertekad untuk terus gencar melakukan sosialisasi dan pelatihan agar masyarakat dapat memahami pengelolaan Depo Sampah (TPS) dengan baik. Dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja, DinLH bekerja sama dengan relawan atau penggiat lingkungan untuk mensosialisasikan pengelolaan TPS. Selain itu, DinLH juga melibatkan pengurus masyarakat setempat agar dapat memahami pola perilaku warga dalam memilah sampah. DinLH menunggu adanya kesadaran dari masyarakat sebagai umpan balik yang dapat membantu pekerjaan mereka. Di lingkup sekolah, DinLH mendorong penerapan program Adiwiyata yang melibatkan komite, orang tua, dan guru sebagai pembimbing teknis, pemantauan dan evaluasi pendidik serta pembudidayaan lingkungan hidup anak di sekolah maupun di rumah mereka. Program ini menekankan pengurangan kemasan plastik

pada jajanan kantin. DinLH telah menempatkan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di beberapa lokasi kota, mengingat keterbatasan sarana dan prasarana. Selain itu, DinLH juga telah mengeluarkan peraturan daerah terkait pengelolaan sampah dengan harapan masyarakat dapat mengelola sampahnya sendiri agar membantu pekerjaan tenaga Pekerja Umum di TPS. Berdasarkan informasi yang diperoleh, terdapat total 9 TPS aktif di Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Membangun Kepercayaan

Salah satu prinsip sinergi adalah membangun kepercayaan dalam organisasi, yaitu dengan memikirkan kepercayaan secara positif dan membangunnya langkah demi langkah serta komitmen demi komitmen. Dalam konteks interaksi antara Satpol PP dan DLH dengan masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur, indikator kepercayaan yang dapat dibangun adalah mereka berinteraksi secara proaktif dengan masyarakat, mendengarkan masukan, menjawab pertanyaan, dan menanggapi keluhan terkait ketertiban, kebersihan, serta keindahan wilayah perkotaan. Satpol PP dan DLH di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak hanya berkolaborasi satu sama lain, tetapi juga dengan instansi terkait lainnya untuk mengimplementasikan regulasi kebersihan lingkungan. Mereka berupaya bersinergi dan berkoordinasi agar memiliki satu visi, satu pendapat, dan satu komitmen demi kelancaran pelaksanaan kebersihan di daerah tersebut. Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi dan media sosial, serta koordinasi langsung antara pimpinan Satpol PP dan DLH untuk menangani masalah kebersihan lingkungan. Upaya sinergi dan koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat terkait kebersihan dan kenyamanan lingkungan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

4. Kreatifitas

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki aksi baru dalam membentuk inovasi pembuatan paving block dan genteng cetak dari sampah plastik. Selain itu, DLH juga berkolaborasi dengan PT Bumi Resik Nusantara Raya dalam mengolah briket dan biodigester di tempat pembuangan akhir (TPA). Inovasi pengolahan briket dan biodigester ini dapat menghasilkan bahan bakar padat, gas metana, dan energi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, DLH juga berupaya mengajarkan masyarakat untuk membuat kompos secara mandiri di lokasi depo sampah. Hal ini menunjukkan inisiatif dan kreativitas masyarakat Kota Sampit dalam mengelola limbah rumah tangga menjadi kompos yang dapat dipasarkan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga.

3.2 Faktor Penghambat Dalam Sinergitas Yang Dilakukan Satpol PP Dan DLH Dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di wilayah perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur, Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup menghadapi beberapa kendala, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jumlah anggota Satpol PP yang terbatas, hanya 150 orang, sehingga rasio 1 anggota per 2.907 jiwa penduduk.

2. Anggaran: Keterbatasan anggaran Satpol PP dan Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada kinerja dan pencapaian tujuan. Anggaran terbatas untuk pelatihan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Regulasi: Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur perlu lebih memperhatikan penegakan regulasi terkait kebersihan lingkungan. Masih ditemukan individu yang melanggar aturan, sehingga Satpol PP perlu meningkatkan tindakan tegas dalam memberikan sanksi.

3.3 Upaya Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Mewujudkan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan Wilayah Perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan ketertiban, kebersihan, dan keindahan wilayah perkotaan, antara lain:

1. Menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bumi Resik Nusantara Raya untuk membangun pabrik industri pengolahan sampah di TPA. Ini dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia melalui kerja sama dengan pihak swasta.
2. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung fasilitas dan sarana prasarana terkait kebersihan dan ketertiban, serta memanfaatkan media digital untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat.
3. Meningkatkan penegakan hukum dan pengawasan terhadap regulasi yang berlaku, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Secara keseluruhan, upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi dan mewujudkan kabupaten yang tertib, bersih, dan indah.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Perbedaan otentik dan kebaruan (Novelty) dari penelitian ini dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian: Penelitian sekarang bertujuan untuk memperkuat temuan penelitian sebelumnya (Desi Purnamasari, 2017) yang menyebutkan perlunya mempersiapkan lahan yang sesuai, meningkatkan kesadaran dan kerja sama pedagang kaki lima, serta memperluas penelitian untuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai lingkungan perkotaan. Penelitian sebelumnya lebih berfokus pada permasalahan spesifik seperti pengabaian terhadap pedagang kaki lima, kurangnya pemenuhan tugas pemerintah, dan ketidakefektifan dalam menciptakan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K-3).
2. Ruang Lingkup Penelitian: Penelitian sekarang mencakup analisis yang lebih komprehensif, mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan. Penelitian sebelumnya (Dwi Aries Himawanto, 2005) cenderung terfokus pada isu-isu spesifik seperti kendala dalam penanganan K-3, kurangnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah, serta peran Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Pendekatan dan Strategi: Penelitian sekarang mengusulkan strategi baru, seperti meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah dan aktivitas daring untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penelitian sebelumnya (Rustam, Yaqub, Hayat 2023) lebih berfokus pada identifikasi kendala dan hambatan, seperti pendanaan dan sumber daya manusia yang terbatas.

Rekomendasi: Penelitian sekarang menekankan pentingnya komitmen yang kuat dan terobosan kreatif, inovatif dari semua pihak untuk mengoptimalkan regulasi lingkungan terkait pengelolaan sampah. Penelitian sebelumnya (Bambang Munas Dwiyanto, 2011). Mengidentifikasi perlunya komunikasi yang efektif antara Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat melalui fasilitator pengelolaan sampah. Secara keseluruhan, penelitian sekarang berusaha memperluas dan memperkuat pemahaman yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pengelolaan sampah di lingkungan perkotaan, serta mengusulkan strategi dan rekomendasi yang lebih inovatif dengan sinergi oleh Satpol PP dan DLH dibandingkan dengan penelitian- penelitian sebelumnya.

I. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi pro aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur telah berjalan dengan baik dikarenakan adanya kolaborasi yang baik dari pemerintah setempat dengan komunitas masyarakatnya. Sinergi Satpol PP dan DLH sebagai kunci berjalannya program K-3 di wilayah perkotaan, perihal kolaborasi ini menambahkan temuan baru yang memperluas penelitian pada inovasi sampah Briket dan Biodigester. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat berwawasan lingkungan, disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial agar mempermudah penyaluran aspirasi serta melakukan sosialisasi/literasi digital yang edukatif dan menarik kepada masyarakat. Pemerintah setempat juga seyogiannya mampu merangkul dan berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk orang ketiga swasta dalam rangka memenuhi kelengkapan fasilitas pengelolaan sampah di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Creswell.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program K-3 di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

II. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih banyak diucapkan pada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian.

III. DAFTAR PUSTAKA

Arni, Muhammad. (2005). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Covey, Stephen R. 1994. *7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif (The 7 Habits of Highly Effective People)*. (Pertama). Jakarta: Binarupa Aksara.

Deardorff, D. S., & Williams, G. 2006. *Synergy Leadership in Quantum Organizations*. Fesserdorff Consultants.

- Desromi, F., Lindawati, L., Chimayati, R. L., & Hasmawaty, H. (2022). Organic Sampah Organik Desa Pandan Dulang Kecamatan Semidang Aji dengan Teknologi Biodigester. *Jurnal Nusantara Mengabdi*, 2(1), 21-27.
- Dwiyanto, B. M. (2011). Model peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan sinergi dalam pengelolaan sampah perkotaan.
- Hadi, Abd., Asrori, and Rusman. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Roring, H. N., Tulusan, F. M. G., & Kolondam, H. F. (2023). Sinergitas pemerintah dan masyarakat dalam penanganan sampah di Pasar Pinasungkulan Karombasan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2), 309-317.
- Roselina, G. N. (2023). Skripsi Sinergitas Dinas Lingkungan Hidup Dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Magelang.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. Kedua. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan Jovi dan Retno Suryawati (2020) “*Antar Stakeholders Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kota Di Kota Temanggung*” Diploma atau S1 thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta
- Linda Trisyani, 140403011 (2019) “*Peran Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Dalam Mewujudkan Keindahan Kota Banda Aceh*”. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Najiyati, S. dan S. R. T. S. (2011). Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development). *Jurnal Ketransmigrasian*, 28(2), pp.113-124.
- Purnamasari, Desi (2018) “*Penegakan Hukum Terhadap Pasal 29D Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Mengenai Pedagang Kaki Lima Dikawasan Pasar Royal Kota Serang)*”. Diploma atau S1 thesis, Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I. (2019). “*Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi pada Program Seminggu di Kota Probolinggo (SEMIPRO)*”. *Jurnal Administrasi Publik*
- Suharto Putra Dirgantara Rustam, Cikusin Yaqub 2023. “*Implementasi Kebijakan Program Kebersihan, Keindahan Dan Ketertiban (K3) Untuk Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*”. *Journal Publicuho Political Science*.
- Gaghauna, V. G. (2023). Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan

Produk Hukum Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Dan Penyelenggaraan Kebersihan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah (Doctoral dissertation, IPDN).

Maulidya, A. (2020). Sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah di Kota Metro. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(2), 50-57.

Himawanto, D. A. (2005). Pengaruh Temperatur Karbonasi Terhadap Karakteristik Pembakaran Briket Sampah Kota.

Badan Pusat Statistik. (2022). Proyeksi Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2022. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>

Dinas Lingkungan Hidup. (2022). Volume sampah rata-rata per hari -Rekap Sampah 2020. Open Data Kabupaten Kotawaringin Timur. <http://data.kabKotim.go.id/id/dataset/volume-sampah-rata-rata-per-hari-2020/resource/9a5e7875-f502>



